

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pengendalian Intern

2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016: 20).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 :

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

b. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

e. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindak lanjuti.

2.2 Standar Akuntansi Pemerintah

2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah dikembangkan oleh komite standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah (SAP) harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan/atau Interpensi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP).

2.2.2 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Menurut Standar Akuntansi

Pemerintah

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yaitu:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-laporan operasional (LO), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka laporan realisasi anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban

pada masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal yang tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan realisasi anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi

yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.3.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 70 ayat 1 yang berbunyi:

Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta laporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi:

a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/atau satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD). Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/ atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah

Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan asset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindah

tanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/ digunakan SKPD dan/atau SKPKD.

d. **Prosedur Akuntansi Selain Kas**

Prosedur akuntansi selain kas adalah meliputi serangkaian proses, manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

2.4 Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang SAP. Bagian kerangka konseptual akuntansi pemerintah pada paragraf 35 menyatakan bahwa terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: Relevan, Andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

a. **Relevan**

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

b. **Andal**

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerapan sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penulis jadikan sebagai bahan landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI / TAHUN	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Hari Bagja (2017)	Pengaruh Pengendalian Internal Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	X1: Pengendalian Internal X2: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Y: Kualitas Laporan Keuangan	1. Pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
2	1. Anggraeni S Madja 2. Sahmin Noholo 3. Lukman Pakaya (2013)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	X1: Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	1. Pengaruh yang signifikan dan positif antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan
3	1. Novtania Mokoginta 2. Linda Lambey 3. Winston Pontoh (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	X1: Sistem Pengendalian Intern X2: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	1. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

4	Surya Adhitama (2017)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X1:Standar Akuntansi Pemerintah X2:Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Y:Kualitas Laporan Keuangan	1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
5	Agum Gumelar (2017)	Pengaruh Kualitas SDM, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X2:Standar Akuntansi Pemerintah X3:Sistem Pengendalian Intern Y:Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
6	Ilham Kusuma Nugraha (2017)	Pengaruh Kompetensi SDM Dan Penerpana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X2:Sistem Pengendalian Itern Y:Kualitas Laporan Keuangan	1. Penerapan sistem pengendalian intern belum signifikan efektif terhadap kualitas laporan keuangan
7	Defi Nopianti (2017)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Good Governance Terhadap Kualitas	X1:Standar Akuntansi Pemerintahan Y:Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

		Laporan Keuangan		
8	Kadek Desiana Wati (2014)	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	X2:Penerapan SAP X3:Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Y:Kualitas Laporan Keuangan	1. Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah 2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
9	Dian Irma (2014)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X2:Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Y:Kualitas Laporan Keuangan	1. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
10	Deby Ayu Octarinda (2016)	Pengaruh Kompetensi Sdm, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X2:Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah X3:Sistem Pengendalian Intern Y:Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
11	Megi hermanto (2017)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem	X1:Standar Akuntansi Pemerintah X2:Sistem Akuntansi	1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas

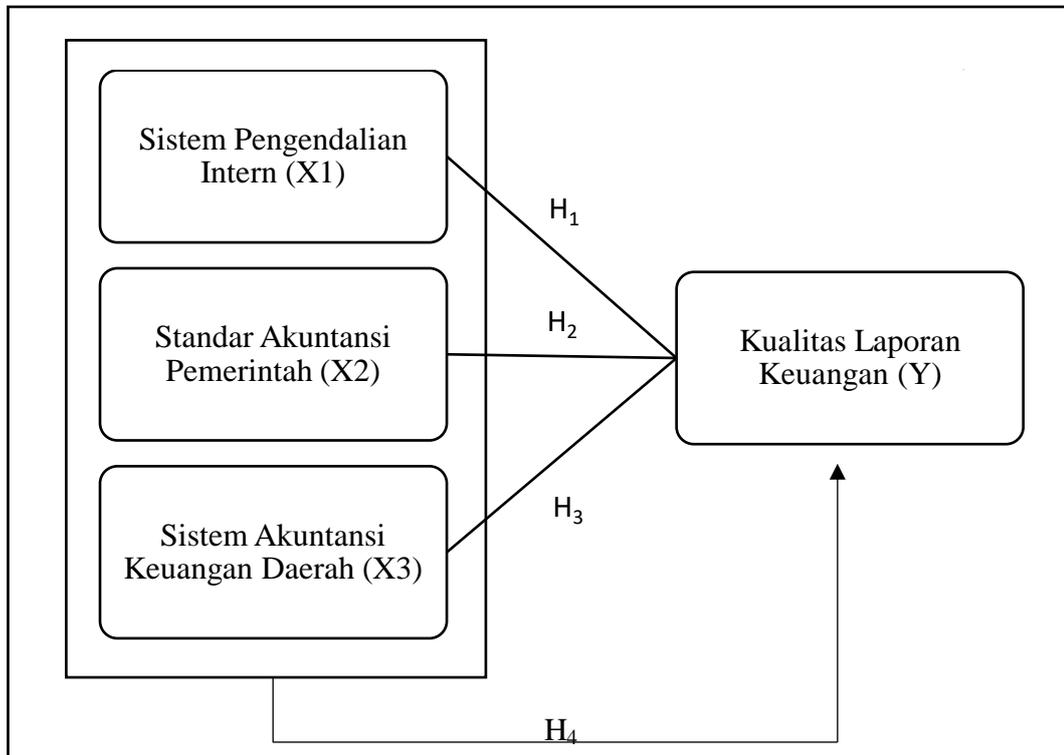
		Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan Daerah Y:Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan keuangan pemerintah daerah 2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
12	Hilda Sri Hastuti (2017)	Pengaruh Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	X2:Standar Akuntansi Pemerintah X3:Sistem Pengendalian Intern Y:Kualitas Laporan Keuangan	1. Standar akuntansi pemerintah signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan 2. Sistem pengendalian intern signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan

Sumber : Data yang Diolah, 2019

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir diatas dimana penelitian ini sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel independen dan variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel penelitian dan objek penelitian.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber : Data yang Diolah, 2019

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar di atas maka, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen yaitu sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah.

2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian landasan teori dan kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H2 : Terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H3 : Terdapat pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H4 : Terdapat pengaruh penerapan sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.